

digital. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen diabaikan hak-haknya dan tidak terlindungi sepenuhnya.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain seperti UU ITE belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen. Dengan demikian UU Perlindungan Konsumen tersebut sudah saatnya ditinjau ulang agar konsumen lebih terlindungi hak-haknya.

B. Saran

Pemerintah perlu menyusun aturan baru yang dapat melindungi konsumen terhadap produk digital. Diantaranya mengatur tentang definisi produk digital yang spesifik serta adanya hak konsumen produk digital dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang tegas.

Pelaku usaha sebaiknya membuat standar yang jelas dan transparan yang dapat melindungi kepentingan konsumen lebih baik, antara lain, pelaku usaha memberikan perjanjian yang jelas di awal sehingga konsumen bisa secara preventif memahami akibat dari penggunaan produk digital tersebut.

Konsumen perlu meningkatkan pemahaman akan hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Atsar & Rani Apriani, 2019, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Abdul Halim Barkatullah, 2019, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar: SAH MEDIA.
- Andi Gunawan, 2019. The Book Of Digital Marketing, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
- Danrivanto Budhijanto. 2019. Cyberlaw Dan Revolusi Industri 4.0. LOGOZ PUBLISHING, Bandung.
- Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jonaedi, Johnny. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Reski Amelia, 2021. Jadi Seller Shopee, Pustaka Taman Ilmu, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Stanton Willian J. 1991. Prinsip Pemasaran, Jilid Satu, Terjemahan, Erlangga, Jakarta
- Susanti Agung Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana. Jakarta.

Syafrudin Makmur. 2019. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, FSH Press, Tangerang.

Yusuf dan Noor, 2021. E-Commerce Konsep dan Teknologi, MNC, Malang.

Penelitian Hukum dengan Topik Serupa

Jurnal

Abuyazid Bustomi, 2018, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen”, Jurnal UNPAL Vol. 16 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Andhika Mediantara Primayoga, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual-Beli Online”, Jurnal Diponegoro Law Vol. 8, Universitas Diponegoro.

Farida Ariany, Aminullah, & Erna Fitriatun, 2022, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online Facebook di Kota Mataram”, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 4

Mutia Rahma Wardani, Joko Priyono, Fifiana Wisnaeni, 2020, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik melalui Instagram”, Jurnal Notarius, Vol. 3 No. 2.

Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, 2015, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Jurnal Ilmiah: Hukum Dirgantara Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

